



## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Yurika Aulia, Anggi Pratama Nasution, Puja Rizky Ramadhan**

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah, dengan belanja modal sebagai variabel moderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Metode asosiatif dan data sekunder dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan digunakan dalam penelitian ini. 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara menjadi bagian dari penelitian ini. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Moderating Regression Analysis (MRA) digunakan untuk mengevaluasi data, yang dikumpulkan selama periode lima tahun dari 2018 hingga 2022 dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD sangat mempengaruhi belanja daerah, yang mengindikasikan bahwa PAD berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk belanja daerah dan bahwa peningkatan PAD akan mendorong peningkatan belanja daerah. Belanja modal berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah hubungan antara PAD dengan belanja daerah. Meskipun belanja modal termasuk dalam komponen belanja daerah, namun pengalokasian belanja modal yang tepat dapat mengurangi dampak negatif penurunan PAD terhadap belanja daerah. Namun, alokasi belanja modal yang tidak efisien dapat memberikan dampak negatif terhadap belanja daerah secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Belanja Modal.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia memerlukan reformasi pemerintahan yang lebih transparan. Ini menyebabkan permintaan yang meningkat untuk

transparansi dan akuntabilitas, dalam hal manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan negara dan daerah.

---

\*Correspondence Address : [yurikaaulia4@gmail.com](mailto:yurikaaulia4@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i11.2024.4415-4423

© 2024UM-Tapsel Press

Pemerintah daerah harus berurusan dengan pengelolaan aset dan biaya daerah, termasuk pengawasan PAD dan pengeluaran lainnya, dan mengelola pendapatan asli daerah (PAD) adalah bagian penting dari tugas yang dihadapi. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan restrukturisasi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pengeluaran daerah oleh pemerintah disebut sebagai belanja daerah (provinsi, kabupaten atau kota) untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsinya di tingkat daerah. Tujuan dari belanja modal pemerintah adalah untuk memperkuat pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membangun infrastruktur untuk pembangunan jangka panjang.

Hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah dapat dipengaruhi oleh belanja modal sebagai pemoderasi. Pengalokasian belanja modal yang efisien dapat mengurangi dampak penurunan PAD terhadap belanja daerah. Sebaliknya, alokasi yang tidak efisien dapat berdampak fatal terhadap belanja daerah. Adanya PAD, belanja daerah dan belanja modal antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan kebijakan yang adil dan berpihak pada daerah tertinggal.

Dalam hal ini, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi terkait kebijakan, keputusan, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan dari pemerintah daerah, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara baik dan benar. Maka, akuntabilitas menekankan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola anggaran yang berlaku.

Studi ini melihat hubungan antara pengeluaran dan pendapatan daerah, khususnya di kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Banyak daerah bergantung dari PAD untuk membiayai belanja mereka, yang membuatnya tidak fleksibel dalam pengalokasian anggaran. Ini terjadi terutama ketika PAD menurun. Ketergantungan PAD akan menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik, terutama di daerah dengan PAD yang potensial rendah.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten dan 8 kota pada tahun 2009. Pemekaran wilayah ini diharapkan akan menghasilkan berbagai keuntungan, termasuk pemerintahan yang lebih efisien, pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih dekat, dan kemungkinan peningkatan PAD melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Berikut ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Belanja Daerah di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

**Tabel 1.2**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Daerah	Belanja Modal
2018	41.632.465.929	41.585.161.516	8.061.164.416
2019	48.136.846.934	44.695.757.009	8.366.290.518
2020	42.332.171.058	41.183.324.504	5.511.648.211
2021	43.764.533.175	45.445.328.446	6.227.859.659

2022	45.131.072.079	45.975.453.693	8.036.334.968
------	----------------	----------------	---------------

Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 PAD menunjukkan kenaikan dari tahun 2018 sebesar 41.632.465.929 ke tahun 2022 sebesar 45.131.072.079, meskipun terjadi penurunan di tahun 2020, secara keseluruhan. Belanja daerah menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2018 sebesar 41.585.161.516 ke tahun 2022 sebesar 45.975.453.693, meskipun terjadi penurunan di tahun 2020. belanja modal menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2018 sebesar 8.061.164.416 ke tahun 2022 sebesar 8.036.334.968, meskipun tidak setinggi tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020. Secara keseluruhan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, maupun Belanja Modal mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2022, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020 untuk ketiga variabel tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan dalam pendapatan dan pengeluaran daerah setelah tahun 2020. Bahwa kondisi keuangan daerah menunjukkan meskipun ada tantangan pada tahun 2020, ada arah positif yang dapat dilihat dalam periode panjang.

Penelitian Asih (2018) tentang "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota," sejalan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyarankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran wilayah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, hasil riset Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013) dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi

pada Kabupaten dan Kota di Aceh)" menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Seperti yang dinyatakan oleh Mukhibad, H., & Aji, M. W. (2020), 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening', terdapat perbedaan yang cukup substansial pada kedua variabel, yaitu PAD dan belanja modal. Dalam model regresi yang saling menguntungkan, hubungan antara variabel PAD dan belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlalu penting, dan variabel intervening tidak dapat memediasi hubungan oleh variabel-variabel independen dan dependen.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode asosiatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi terdiri dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampling jenuh sebagai sampel penelitian, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, penelitian ini dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data sekunder diambil dari website bpps. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana yaitu melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data kemudian melakukan uji hipotesis yaitu uji parsial, dan dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dan dilanjutkan dengan melakukan uji Moderating Regression Analisis (MRA) dengan menggunakan SPSS 25.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**A. Analisis Statistik**

Tabel statistik deskriptif menyajikan ringkasan dari data yang

digunakan, memberikan gambaran umum tentang karakteristik variabel yang dianalisis.

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	33	100.7	111.7	104.439	2.3949
BELANJA_DAERAH	33	100.5	111.6	104.336	2.3844
BELANJA_MODAL	33	90.4	102.0	95.161	2.3312
Valid N (listwise)	33				

Sumber: data olahan SPSS, 2024

Tabel 4.1 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel PAD menyatakan nilai yang relatif stabil, dengan rata-rata 104.439 dan standar deviasi 2.3949. Variabel BELANJA DAERAH dengan rata-rata 104.336 dan standar deviasi 2.3844 menunjukkan bahwa BELANJA DAERAH memiliki distribusi yang relatif konsisten dan tidak jauh dari nilai rata-ratanya. Variabel BELANJA MODAL menunjukkan sedikit lebih banyak variasi dibandingkan dengan PAD dan BELANJA

DAERAH, dengan rata-rata 95.161 dan standar deviasi 2.3312. Ketiga variabel menunjukkan sebaran yang relatif kecil di sekitar nilai rata-rata dengan PAD dan BELANJA DAERAH memiliki stabilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan BELANJA MODAL.

**B. Analisis Regresi**

Model regresi linear menghubungkan variabel independen (PAD) dengan variabel dependen (belanja daerah).

**Tabel 4.2 Uji Regresi Linear**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Beta
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.095	2.227		.492	.626	
PAD	.989	.021	.993	46.372	.000	

a. Dependent Variable: BELANJA\_DAERAH

Sumber: data olahan SPSS, 2024

Tabel 4.2 Uji Regresi Linier untuk menentukan pengaruh variabel independen (PAD) terhadap variabel dependen (BELANJA DAERAH). Untuk PAD, nilai Beta adalah 0.993, menyatakan PAD berpengaruh sangat kuat terhadap BELANJA DAERAH. Nilai statistik t untuk menguji signifikansi koefisien, nilai t adalah 46.372, yang menunjukkan bahwa koefisien tersebut

jauh lebih besar dari kesalahan standarnya, menunjukkan bahwa PAD adalah prediktor yang signifikan. Sig. (Signifikansi): Nilai p (0.000) menunjukkan tingkat signifikansi dari koefisien. Nilai p lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa koefisien PAD adalah signifikan secara statistik, yang berarti PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BELANJA DAERAH

**Tabel 4.3 Uji Regresi Linear**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900 <sup>a</sup>	.810	.804	1.0315

a. Predictors: (Constant), PAD

Sumber: data olahan SPSS, 2024

Tabel 4.3 adalah Uji Regresi Linier untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi yang dibangun dapat menjelaskan variabel dependen (BELANJA MODAL) berdasarkan variabel independen (PAD). Nilai R sebesar 0.900 menunjukkan hubungan yang kuat antara PAD dan BELANJA MODAL. Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0.810 berarti bahwa 81% dari variasi dalam BELANJA MODAL dapat dijelaskan oleh PAD yang menyatakan model regresi cukup baik untuk menjelaskan data. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> yaitu 0.804, yang menunjukkan bahwa model masih cukup baik meskipun disesuaikan

untuk jumlah variabel. Nilai Std. Error of the Estimate sebesar 1.0315 menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata dalam prediksi model.

**C. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji parsial (Uji t), Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>), dan uji moderasi (MRA)

**Uji Parsial (Uji t)**

Tabel uji t digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien regresi.

**Tabel 4.4 Uji Hipotesis (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Beta
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3.648	7.954		.459	.650	
PAD	.876	.076	.900	11.508	.000	

a. Dependent Variable: BELANJA\_MODAL  
 Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2024

Tabel 4.4 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan koefisien regresi 0.876 dan p-value 0.000. R Square sebesar 0.810 menyatakan bahwa 81% variasi pada Belanja Modal dijelaskan oleh PAD. PAD (0.900): kekuatan hubungan antara PAD dan BELANJA MODAL. Nilai t untuk menguji

apakah koefisien PAD berbeda secara signifikan dari nol. Nilai t yang tinggi (11.508) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap BELANJA MODAL

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) menyajikan informasi tentang seberapa baik model regresi menjelaskan varians dalam data.

**Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 <sup>a</sup>	.986	.985	.2888

a. Predictors: (Constant), PAD  
 Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2024

Tabel 4.5 menyatakan analisis regresi linear Nilai R Square (R<sup>2</sup>) = 0.986 menunjukkan bahwa 98.6% variasi pada variabel dependen (BELANJA DAERAH) dapat dijelaskan oleh variabel independen (PAD). Nilai R<sup>2</sup> yang mendekati 1 menyatakan model sangat

baik dalam menyajikan data. Adjusted R<sup>2</sup> yang Disesuaikan = 0.985 yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Adjusted R<sup>2</sup> menunjukkan gambaran yang realistis tentang seberapa baik model menyajikan variasi dalam data, terutama ketika ada lebih dari satu variabel independen. Nilai

ini sedikit lebih rendah dari  $R^2$  karena disesuaikan untuk jumlah variabel yang digunakan. Nilai yang tinggi (mendekati 1) menunjukkan bahwa model tetap kuat meskipun disesuaikan. Secara keseluruhan, nilai  $R^2$  dan Adjusted  $R^2$  yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun dengan PAD

sebagai prediktor sangat efektif dalam menjelaskan variasi dalam BELANJA DAERAH. Ini menunjukkan bahwa PAD adalah faktor yang sangat relevan dan signifikan dalam memprediksi pengeluaran daerah.

**Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 <sup>a</sup>	.999	.999	.0823

a. Predictors: (Constant), XM, PAD  
 Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2024

Tabel 4.6 menyajikan Nilai R yang sangat tinggi (0.999) dan R Square (0.999) menunjukkan bahwa model regresi yang melibatkan PAD dan XM dapat menjelaskan hampir seluruh variasi dalam BELANJA MODAL (99.9%).

Moderating Regression Analysis (MRA) biasanya disajikan untuk menunjukkan hasil uji moderasi termasuk koefisien untuk variabel interaksi dan signifikansinya.

**Tabel 4.7 Uji Moderasi (MRA)**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.	Beta
		B	Std. Error			
1	(Constant)	97.432	1.491		65.366	.000
	PAD	-.934	.027	-.959	-34.937	.000
	XM	.010	.000	1.910	69.541	.000

a. ependent Variable: BELANJA\_MODAL  
 Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2024

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (PAD dan XM) bernilai nol, maka nilai belanja daerah adalah sebesar 97,432. Setiap kenaikan satu satuan PAD akan menurunkan belanja daerah sebesar 0,934 satuan. Koefisien t sebesar -34,937 dan p-value sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap belanja daerah signifikan secara statistik. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Setiap kenaikan belanja modal sebesar satu satuan maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,010 satuan. Koefisien t sebesar 69,541 dan p-value sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh XM terhadap belanja daerah signifikan secara statistik. XM memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap belanja daerah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengurangi belanja daerah secara signifikan. XM (Belanja Modal) meningkatkan belanja daerah secara signifikan. Kedua variabel tersebut menunjukkan hasil yang sangat signifikan secara statistik dengan nilai p-value sebesar 0,000.

**Pembahasan**

1. Hubungan PAD dan Belanja Daerah:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,989 dengan nilai signifikansi (p-value) 0,000 terhadap belanja daerah. Ini menandakan bahwa PAD memiliki dampak positif dan signifikan terhadap

belanja daerah. Nilai R-squared sebesar 0,986 menjelaskan bahwa 98,6% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh PAD, yang menegaskan pentingnya PAD dalam menentukan besarnya belanja daerah di wilayah/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Asih (2018), yang juga menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja daerah, yang mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD, karena peningkatannya berkontribusi langsung terhadap peningkatan belanja daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan PAD yang baik untuk mendukung pembangunan daerah

## 2. Hubungan PAD dan Belanja Modal:

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dengan koefisien regresi sebesar 0,876 dan p-value 0,000. Nilai R-squared sebesar 0,810 menunjukkan bahwa PAD menjelaskan 81% variasi dalam Belanja Modal, mengindikasikan bahwa PAD adalah faktor signifikan dalam mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mawarni, D., dan Abdullah, S. (2013) yang menunjukkan bahwa PAD berdampak positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan PAD untuk membiayai proyek investasi yang dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan publik.

Untuk memastikan belanja modal dilakukan secara optimal, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan PAD. Dengan demikian, peningkatan PAD akan memungkinkan pendanaan proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Pengaruh Moderasi Belanja Modal (XM):

Analisis regresi yang memasukkan belanja modal sebagai variabel moderasi (XM) menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal mengalami penurunan koefisien signifikan sebesar 0,010 dengan p-value 0,000. Meskipun pengaruhnya kecil, ini menunjukkan bahwa belanja modal dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara PAD dan belanja daerah. Nilai R-squared sebesar 0,999 menunjukkan bahwa sebagian besar variasi belanja daerah dijelaskan oleh PAD dan interaksinya dengan belanja modal. Belanja modal tidak berdampak langsung, tetapi mempengaruhi hubungan antara PAD dan belanja daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mukhibad & Aji (2020), yang menemukan bahwa PAD dan pinjaman daerah memiliki pengaruh besar terhadap belanja modal, namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dalam model regresi kedua. Dengan R-squared sebesar 0,810, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD adalah faktor penting dalam mempengaruhi belanja modal.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa peningkatan PAD dapat dioptimalkan untuk mendukung belanja daerah yang lebih baik, pemerintah daerah perlu berkonsentrasi pada pengelolaan belanja modal yang efektif. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kualitas infrastruktur dan

layanan publik, yang pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh yang besar terhadap anggaran di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Utara.

b. Peningkatan PAD berkontribusi pada peningkatan belanja daerah, yang menegaskan pentingnya PAD sebagai sumber utama pendanaan

c. Belanja modal dapat membantu mengurangi dampak negatif dari penurunan PAD terhadap belanja daerah, sehingga pengelolaan belanja modal yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan belanja daerah, terutama di wilayah dengan potensi PAD yang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan Implementasi Keuangan Daerah di Indonesia: Praktik dan Permasalahannya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6 (1), 13-34.

Adyatma, E. (2015). Dampak pendapatan primer daerah dan alokasi umum terhadap belanja modal dalam memperlambat pertumbuhan ekonomi. *Majalah elektronik Akuntansi Universitas Stikubank*.

Apriliawati (2020) Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Ardiansyah, R. (2023). Faktor penentu pendapatan utama daerah dan aset penyeimbang kemandirian ekonomi daerah. Jurnal Manajemen dan Profesionalisme*, 4 (1), 92-106.

Asih, S. (2018). Dampak bagi hasil pajak daerah, pendapatan primer daerah, pembayaran daerah dan distribusi penerimaan pajak terhadap belanja daerah sebagai variabel perlambatan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten dan kota. *Jurnal Bisnis dan Akuntan Publik*, 9 (1), 177-191.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2022). Luas dan jumlah pulau menurut wilayah/kota administratif di Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2021. Diakses tanggal 3 Juli 2024, dari <https://sumut.bps.go.id/statictable/2022/03/01/2518/lebar-region-dan-saarten-number-area-city-utara-provinsi-2021.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi (dalam ribuan rupee) Kabupaten/Kota.id/indicator/13/373/1/realisasi-pendapatan-dan-toko-pemerintah-provinsi-ribu-rupiah-menurut-kabupaten-kota.html

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2018-2022. Diakses pada 21 Juli 2024, dari <https://sumut.bps.go.id/publication/2023/12/01/cdfe7166890417b876d20be8/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-sumatera-utara-2021-2022-.html>

Bratakusumah, D.S. dan Solihin, D. (2002). Otonomi dalam pemerintahan provinsi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Harahap, AP (2018). Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serdang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Bisnis-Net*, 1 (1).

Latif, A. (2022). Analisis Kontribusi PBB dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi Periode 2011-2016. *Madani: Jurnal Sains Multidisiplin*, 1(1).

Mardiasme (2018). Otonomi dan pengendalian perekonomian daerah. Yogyakarta: Andi Mengimbangi.

Maslikah, S.H. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dana Distribusi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Modal (Studi Kasus Daerah/Kota di Provinsi Jawa Tengah).

Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302(2013), 0164.

Mukhibad, H., & Aji, M. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja



keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas, 3(1), 97-115.

Nugraeni, N., & Paramitalaksmi, R. (2020, Januari). PENGARUH DANA UMUM (DAU) FLYPAPER DAN PENDAPATAN PRIMER (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (BD). Dalam jurnal PROSES SEMINAR NASIONAL DMI (vol. 1, hal. 100-106).

Rahmawati (2017) Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung. Jurnal Penelitian Akuntansi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 (2006). Pengertian Belanja Modal. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Prasetyo, A.D. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap belanja daerah sebagai variabel moderasi belanja modal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 16 (1), 60-76.

PSAK No. 2 (2011) Pengertian Belanja Modal. Jakarta: Badan Inspeksi Republik Indonesia

Saraswati, D. (2018). Pengaruh pendapatan primer daerah, perimbangan dana dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ketika efisiensi perekonomian pemerintah daerah menjadi variabel moderasi pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Jurnal Bisnis dan Akuntan Publik, 8 (1), 44-55.

Sugiyono. tahun 2014. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan RandD. Bandung: Alfabet

Sulaeman, A.S. dan Silvja, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah dan Belanja Modal, Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Daerah di Indonesia. Hubungan dengan Pendidik, 4(1), 97-112. \ n Mardon, RD, Rotinsula, DC Greenfoot, GM (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21 (4).

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta: Menteri Luar Negeri.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia